



Infrastruktur Perbaiki Jalan Lingkungan Terhambat

JAKARTA, KOMPAS — Perbaikan jalan rusak yang masuk kategori jalan lingkungan atau jalan permukiman terhambat karena belum cairnya APBD DKI Jakarta tahun 2015. Dinas Bina Marga memprioritaskan perbaikan kerusakan di jalan utama karena bisa menggunakan anggaran yang mendahului.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmada Faizal, Senin (2/3), mengatakan, dari pengaduan jalan rusak yang masuk, tercatat 1.091 titik jalan rusak di lima wilayah kota Jakarta. "Dari 1.091 titik jalan rusak, sudah tertangani 680 titik. Kami utamakan tutup lubang di jalan protokol yang ramai lalu lintas karena potensi kecelakaan lebih besar," katanya.

Di Jakarta Pusat, dari 161 titik jalan rusak, sudah 111 titik tertangani. Di Jakarta Utara, dari 135 titik, tertangani 90 titik. Adapun di Jakarta Barat, 194 titik dari 339 titik jalan rusak sudah tertangani. Di Jakarta Selatan, dari 181 titik, 118 tertangani. Di Jakarta Timur, 164 titik dari 275 titik jalan rusak tertangani.

Untuk jalan utama, lanjut Yusmada, anggaran perbaikan bisa diambil melalui anggaran mendahului sesuai Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2014 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan APBD 2015.

Lewat anggaran mendahului, Dinas Bina Marga telah mendapat alokasi perbaikan jalan rusak dengan rincian Rp 7,4 miliar untuk Jakarta Pusat, Rp 6,6 miliar (Jakarta Utara), Rp 7,6 miliar (Jakarta Barat), Rp 7,9 miliar (Jakarta Selatan), dan Rp 6,4 miliar (Jakarta Timur).

"Perbaikan jalan yang sifatnya mendesak dilakukan dengan swakelola, tanpa proses lelang. Pembelian material dilakukan lewat *e-catalogue*," ujar Yusmada.

Dinas Bina Marga juga telah mengusulkan proses lelang untuk perbaikan jalan lingkungan atau jalan permukiman. Apabila APBD 2015 sudah ditetapkan,

proses lelang bisa cepat berjalan dan perbaikan cepat dilakukan.

Tol pelabuhan

Masih terkait infrastruktur jalan raya, pembangunan jalan tol pelabuhan di Jakarta Utara masih terkendala masalah pembebasan lahan. Sebanyak 17 bidang lahan di Koja dan Cilincing belum selesai dibebaskan.

Dua bidang di antaranya telah dilimpahkan ke pengadilan dalam proses konsinyasi. Sementara 15 bidang sisanya masih dalam pengurusan administrasi.

Ketua Panitia Pembebasan Tanah yang juga Sekretaris Kota Jakarta Utara Junaedi menuturkan, pihaknya sebagai fasilitator telah melakukan berbagai cara agar permasalahan ini segera selesai. Namun, pembebasan belum selesai karena terbentur berbagai masalah.

Meski demikian, Junaedi mengatakan, proyek jalan tol tetap dilanjutkan. Jalan tol tersebut diharapkan selesai akhir tahun ini.

Rohilah (60), pemilik salah satu bidang lahan di Kelurahan Kalibaru, Cilincing, menolak nilai yang ditawarkan pemerintah. "Sejak awal saya mematok Rp 15 juta per meter. Itu empat tahun lalu. Tetapi, yang ditawarkan cuma Rp 1,9 juta. Tentu saya tidak mau," kata Rohilah. (FRO/JAL)